

SKRIPSI

**PROSPEK SUKU KURDI DI IRAK TERKAIT DENGAN HAK
MENENTUKAN NASIB SENDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL**

Di Susun Oleh

Iswaji

NIM : 1510112150

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

No.Reg : 06/PK-VI/IV/2019



No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: ISWAJI	No. Alumni Fakultas:
a)Tempat/Tanggal Lahir: Ky. Gadang, 1 Mei 1997	f)Tanggal Lulus : 22 Oktober 2019	g) Predikat Lulus : Sangat memuaskan
b)Nama Orang Tua : Amir Hosen dan Marnis	h) Lama Studi : 4 Tahun 2 Bulan	i) IPK : 3.70
c)Fakultas : Hukum	j) Alamat : Pakasai, Kota Pariaman	
d)Program Kekhususan : Hukum Internasional		
e) No BP: 1510112150		

**PROSPEK SUKU KURDI DI IRAK TERKAIT DENGAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI
DALAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

(Iswaji 1510112150, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 76 Halaman)
Pembimbing : Dr., Delfianti S.H., M.H Dan Dr., Syofirman Sofyan S.H.,M.H

Abstrak

Hak menentukan nasib sendiri merupakan hak suatu bangsa yang berada di bawah rezim rasis, dominasi asing dan kolonialisme. Hak menentukan nasib sendiri mengalami perkembangan sejak pertama kali dicetuskan oleh Woodrow Wilson, hak menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 55 Piagam PBB, Konvensi Hak Sipil dan Politik (*International Convention On Civil Political Rights*) Tahun 1966, Konvensi hak Ekonomi, sosial dan budaya (*International Convention on Economic Social and Cultural Rights*) Tahun 1966 dan Deklarasi Jaminan Independensi Terhadap Penjajahan Atas Negara dan Bangsa (*Declaration On The Granting Of Independence To Colonial Countries and People*) Tahun 1960. Hak menentukan nasib sendiri dapat digunakan, jika dapat memenuhi karakteristik yang telah ditetapkan dalam Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II Tahun 1977. Pemenuhan karakteristik tersebut bertujuan agar penggunaan prinsip hak menentukan nasib sendiri tidak bertentangan dengan prinsip integritas teritorial (*Territorial Integrity*) yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB. Hak ini digunakan oleh suku Kurdi di Irak untuk melepaskan diri dari Irak dengan melaksanakan referendum secara sepihak pada bulan September tahun 2017. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian yakni pertama bagaimana prospek suku Kurdi di Irak terkait dengan hak menentukan nasib sendiri, yang kedua bagaimana tantangan serta upaya yang telah dilakukan suku Kurdi di Irak terkait dengan hak menentukan nasib sendiri. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, 1) Prospek suku Kurdi di Irak terkait dengan hak menentukan nasib sendiri belum sesuai dengan karakteristik yang ditetapkan Pasal 1 ayat (2), Pasal 55, Pasal 73 dan Pasal 76 Piagam PBB dimana Pasal-Pasal tersebut hanya memberikan kewenangan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa yang berada dibawah kolonialisasi serta Protokol I Tahun 1977 yang memberikan karakteristik yang harus dipenuhi terkait dengan hak menentukan nasib sendiri yakni adanya penjajahan, rezim rasis, dan dominasi asing. 2) Tantangan kedepan yang dihadapi oleh suku Kurdi di Irak terkait dengan hak menentukan nasib sendiri adalah adanya integritas teritorial yang dimiliki oleh negara Irak. Prinsip integritas teritorial memberikan kewenangan kepada negara Irak untuk menggunakan segala upaya untuk mempertahankan wilayah teritorial yang menjadi yurisdiksi Irak tanpa boleh di intervensi oleh pihak manapun hal ini juga diatur di dalam Piagam PBB prinsip ini dikenal dengan prinsip (*Territorial Integrity*). Hal ini terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh suku Kurdi di Irak untuk memerdekakan diri.

Kata Kunci : Prospek; Suku Kurdi Di Irak; Hak Menentukan Nasib Sendiri; dan Hukum Internasional

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 22 Oktober 2019.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.


Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I 	Penguji II
Nama Terang	Dr. Mardenis, S.H, M.Si	M. Jhon, SH,M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional : **Dr. Jean Elvardri, S.H,M.H**

Tanda Tangan

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: ISWAJI	No. Alumni Fakultas:
	a)Tempat/Tanggal Lahir: Ky. gadang, 1 Mei 1997 b)Nama Orang Tua : Amir Hosen dan Marnis c)Fakultas : Hukum d)Program Kekhususan : Hukum Internasional e) No BP: 1510112150	f)Tanggal Lulus : 22 Oktober 2019 g) Predikat Lulus : Sangat memuaskan h) Lama Studi : 4 Tahun 2 Bulan i) IPK : 3.70 j) Alamat : Pakasai, Kota Pariaman	

THE PROSPECT OF KURDI TRIBE IN IRAK RELATED TO SELF DETERMINATION RIGHT IN INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE

(Iswaji 1510112150, Faculty of Law, University of Andalas, 2019, 76 Pages)

Supervisor: Dr., Delfianti S.H., M.H and Dr., Syofirman Sofyan S.H., M.H

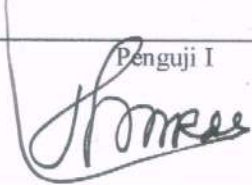
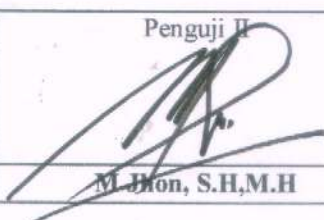
Abstract

The right to self-determination is the right of the nation under racist regimes, foreign domination and colonialism. Woodrow Wilson, the right to self-determination in international law can be found in Article 1 paragraph (2) and Article 55 of the UN Charter, International Convention on the Economic and Social and Cultural Rights of 1966 and Declaration of Granting Independence to the Colonial State and People of 1960. The right to self-determination can be used, if it can fulfill the characteristics that have been stipulated in Additional Protocol I and Additional Protocol II of 1977. Fulfillment of these characteristics requires the use of the principle of self-determination not to conflict with the principle of territorial integrity (territorial integrity) contained in Article 2 paragraph (1) of the United Nation Charter. This right was used by the Kurds tribes in Iraq to break away from Iraq by holding a unilateral referendum in September 2017. What is challenging in this study is the first time how to study the Kurds tribes in Irak related to the right to change themselves, which can be changed by The efforts made by the Kurds tribes in Irak are related to the right to self-determination. This writing uses the normative juridical method. The results showed, 1) The prospect of the Kurdish Tribes in Irak related to the right to determine one's fate was not in accordance with the characteristics stipulated in Article 1 paragraph (2), Article 55, article 73 and Article 76 of the UN Charter in which these Articles only gave the authority the right to self-determination I of 1977 which gave characteristics that were must be related to the right to determine the fate of colonialism, racist regimes and foreign domination. 2) The future challenge which is opposed by the Kurds in Irak related to the right to self-determination is the territorial integrity possessed by the Iraqi state. The principle of territorial integrity authorizes the Iraqi state to use all efforts to defend territorial territories which become Iraqi jurisdiction may be intervened by any party. It also regulates in the United Nations Charter this principle is called the Territorial Integrity principle. This is related to the efforts made by the Kurds Tribes in Irak to free themselves.

Keywords: Prospects; Kurdish Tribe in Irak; The Right to Self Determination; and International Law

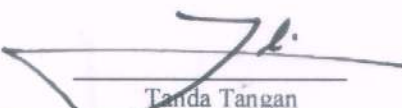
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 22 Oktober 2019. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan		Penguji I		Penguji II
Nama Terang		Dr. Mardenis, S.H, M.Si		M. Hon, S.H,M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional : Dr. Jean Elfandri, S.H, M.H


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: